

NAMA : ZULFAA SALSABILLAH
NPM : 2313031038
KELAS : B
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. Sebuah rumah sakit daerah mengalami dilema ketika harus memilih antara membeli alat kesehatan canggih yang mahal atau meningkatkan gaji tenaga medis yang sudah lama tidak naik. Situasi ini menggambarkan karakteristik sektor publik berupa:

- A. Orientasi profit yang tinggi
- B. Akuntabilitas kepada pemegang saham
- C. Sumber daya terbatas dengan tuntutan pelayanan tidak terbatas**
- D. Kebebasan manajemen dalam pengambilan keputusan
- E. Minimnya intervensi politik dalam operasional

2. Pemerintah daerah X menetapkan kebijakan pembebasan pajak untuk industri kecil menengah meskipun akan mengurangi pendapatan daerah. Keputusan ini paling tepat dianalisis dari perspektif:

- A. Maksimalisasi profit jangka pendek
- B. Kepentingan stakeholder tunggal
- C. Tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas**
- D. Efisiensi operasional semata
- E. Kompetisi pasar bebas

3. Dalam konteks New Public Management, jika sebuah instansi pemerintah menerapkan sistem kontrak kinerja dan mengukur output layanan secara kuantitatif, dampak negatif yang paling mungkin terjadi adalah:

- A. Peningkatan akuntabilitas yang berlebihan
- B. Pengabaian aspek kualitas layanan yang sulit diukur**
- C. Terlalu fokus pada kepuasan masyarakat
- D. Berkurangnya efisiensi anggaran
- E. Meningkatnya birokrasi yang kaku

4. Sebuah BUMN yang bergerak di sektor listrik harus menyeimbangkan antara misi pelayanan publik (tarif terjangkau) dengan kemandirian finansial. Situasi ini menunjukkan karakteristik:

A. Organisasi murni sektor swasta

B. Organisasi quasigovernment dengan dual objectives

C. Organisasi nonprofit yang bergantung donasi

D. Organisasi privat yang profitoriented

E. Organisasi sektor publik murni yang fully subsidized

5. Ketika terjadi perubahan kepemimpinan daerah yang menyebabkan perubahan prioritas program dan anggaran secara drastis, hal ini menunjukkan pengaruh:

A. Pasar dan kompetisi bisnis

B. Stakeholder eksternal swasta

C. Lingkungan politik dan siklus pemilihan

D. Regulasi internasional

E. Fluktuasi ekonomi global

6. Sebuah dinas pendidikan ingin mengevaluasi efektivitas program beasiswa. Data menunjukkan: anggaran Rp 5 miliar, 1.000 siswa menerima beasiswa, 85% siswa lulus tepat waktu, dan 70% melanjutkan ke perguruan tinggi. Indikator manakah yang paling tepat untuk mengukur outcome program?

A. Anggaran Rp 5 miliar yang terserap 100%

B. Jumlah 1.000 siswa penerima beasiswa

C. Persentase 85% siswa lulus tepat waktu

D. Biaya per siswa Rp 5 juta

E. Rasio efisiensi anggaran terhadap output

7. Dalam menerapkan activitybased costing (ABC) di rumah sakit pemerintah, tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah:

A. Kesederhanaan sistem yang sudah ada

B. Identifikasi cost driver untuk aktivitas pelayanan yang kompleks dan beragam

C. Terlalu banyak profit center yang harus dikelola

D. Kompetisi dengan rumah sakit swasta

E. Minimnya jenis layanan yang ditawarkan

8. Pemerintah kota membandingkan biaya pengelolaan sampah per ton antara lima kecamatan untuk mengidentifikasi best practice. Teknik ini disebut:

A. Zerobased budgeting

B. Performance budgeting

C. Benchmarking

D. Costbenefit analysis

E. Variance analysis

9. Jika sebuah instansi pemerintah menghitung bahwa biaya langsung program vaksinasi adalah Rp 800 juta dan biaya tidak langsung (overhead) sebesar Rp 200 juta, namun hanya melaporkan biaya langsung saja, maka:

A. Laporan biaya sudah akurat dan memadai

B. Full costing tidak tercapai dan dapat menyesatkan analisis

C. Biaya overhead tidak relevan untuk sektor publik

D. Metode variable costing sudah tepat diterapkan

E. Akuntansi pertanggungjawaban sudah optimal

10. Dalam menentukan tarif retribusi parkir, pemerintah daerah perlu menghitung total biaya pengelolaan parkir dan membaginya dengan estimasi jumlah kendaraan. Pendekatan ini merupakan aplikasi dari:

A. Marginal costing

B. Standar costing

C. Full cost recovery pricing

D. Marketbased pricing

E. Penetration pricing

11. Sebuah dinas kesehatan menetapkan target "menurunkan angka kematian ibu 20% dalam 3 tahun" namun tidak mengalokasikan anggaran memadai untuk puskesmas dan pelatihan bidan. Kelemahan sistem pengendalian manajemen ini terletak pada:

A. Perumusan strategi yang tidak jelas

B. Ketidakselarasan antara perencanaan strategis dan alokasi sumber daya

- C. Sistem monitoring yang terlalu ketat
- D. Evaluasi kinerja yang terlalu sering
- E. Struktur organisasi yang terlalu datar

12. Dalam konteks balance scorecard sektor publik, jika perspektif keuangan menunjukkan efisiensi anggaran meningkat tetapi perspektif pelanggan menunjukkan kepuasan masyarakat menurun, maka:

- A. Kinerja organisasi sudah optimal
- B. Perlu tradeoff analysis dan penyeimbangan kembali prioritas**
- C. Fokus hanya pada efisiensi keuangan sudah tepat
- D. Kepuasan masyarakat tidak relevan diukur
- E. Balance scorecard tidak cocok untuk sektor publik

13. Kepala dinas diberikan kewenangan penuh mengelola anggaran Rp 10 miliar dengan kebebasan realokasi antar pos, namun harus mencapai target kinerja yang disepakati. Sistem ini menggambarkan konsep:

- A. Sentralisasi penuh
- B. Responsibility center dengan desentralisasi terkendali**
- C. Budget linearity yang kaku
- D. Topdown budgeting murni
- E. Zero accountability

14. Seorang auditor menemukan bahwa realisasi anggaran pembangunan jalan mencapai 98%, tetapi kualitas jalan buruk dan rusak dalam 6 bulan. Temuan ini menunjukkan kegagalan pengendalian pada aspek:

- A. Input control
- B. Process control dan output quality**
- C. Budget discipline
- D. Financial compliance
- E. Cash management

15. Dalam mengevaluasi kinerja kepala puskesmas, indikator yang paling tepat mengukur outcome (bukan hanya output) adalah:

- A. Jumlah pasien yang dilayani per bulan
- B. Persentase penyerapan anggaran
- C. Penurunan angka kesakitan penyakit menular di wilayah kerja**
- D. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia
- E. Ketepatan waktu pelaporan administrasi

16. Pemerintah daerah mengalokasikan 30% anggaran untuk pendidikan karena diamanatkan undang-undang, meskipun analisis menunjukkan sektor kesehatan lebih membutuhkan. Situasi ini menggambarkan:

- A. Kebebasan penuh dalam alokasi anggaran
- B. Constrained optimization dalam penganggaran publik**
- C. Bottomup budgeting yang efektif
- D. Performancebased budgeting murni
- E. Incremental budgeting tradisional

17. Dalam siklus anggaran, tahap yang paling krusial untuk memastikan akuntabilitas demokratis adalah:

- A. Penyusunan oleh eksekutif saja
- B. Pembahasan dan persetujuan oleh legislatif**
- C. Pelaksanaan oleh birokrat
- D. Pelaporan internal eksekutif
- E. Audit oleh internal auditor

18. Sebuah satuan kerja mengajukan anggaran dengan asumsi inflasi 5%, tetapi realisasi inflasi 10%. Untuk mengantisipasi ini, seharusnya anggaran dilengkapi dengan:

- A. Revisi anggaran otomatis setiap bulan
- B. Budget slack yang besar
- C. Analisis sensitivitas dan skenario multiple**
- D. Penghapusan seluruh asumsi makro
- E. Pengurangan program secara acak

19. Prinsip anggaran yang PALING dilanggar ketika pemerintah menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pendidikan dialihkan ke pembangunan infrastruktur adalah:

- A. Transparency
- B. Accountability
- C. Specificity/Earmarking**
- D. Periodicity
- E. Unity

20. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) bertujuan utama untuk:

- A. Mengurangi beban kerja pemerintah
- B. Meningkatkan legitimasi dan responsivitas anggaran terhadap kebutuhan lokal**
- C. Mempercepat proses penyusunan anggaran
- D. Mengalihkan tanggung jawab ke masyarakat
- E. Mengurangi alokasi anggaran pemerintah

21. Dinas Perhubungan menggunakan lineitem budget yang sangat detail (500+ akun belanja). Kelemahan utama sistem ini adalah:

- A. Transparansi yang terlalu tinggi
- B. Fleksibilitas rendah dan fokus pada input bukan kinerja**
- C. Terlalu sulit dipahami legislatif
- D. Tidak ada pengendalian atas pengeluaran
- E. Terlalu fokus pada hasil program

22. Sebuah program pemberdayaan UMKM menganggarkan: pelatihan (Rp 200 juta), bantuan modal (Rp 500 juta), dan pendampingan (Rp 100 juta) dengan target 500 UMKM mandiri. Ini adalah contoh:

- A. *Lineitem budgeting* murni
- B. *Performance budgeting* dengan output/outcome terukur**
- C. *Incremental budgeting*
- D. *Zerobased budgeting* tanpa *baseline*
- E. Program *budgeting* tanpa target

23. Dalam *ZeroBased Budgeting* (ZBB), setiap program dinilai dari nol setiap tahun tanpa melihat alokasi tahun sebelumnya. Tantangan terbesar implementasi ZBB di Indonesia adalah:

A. Terlalu sederhana untuk diterapkan

B. Membutuhkan analisis mendalam yang *timeconsuming* dan sumber daya besar

C. Tidak ada manfaat yang signifikan

D. Legislatif menolak transparansi

E. Tidak cocok dengan sistem pemerintahan

24. Anggaran berbasis kinerja mengaitkan alokasi dana dengan target output/outcome. Jika target tidak tercapai, implikasi yang paling logis adalah:

A. Tidak ada konsekuensi apa pun

B. Evaluasi penyebab dan penyesuaian alokasi/strategi periode berikutnya

C. Penghapusan program secara otomatis

D. Peningkatan anggaran untuk kompensasi

E. Penggantian seluruh staf pelaksana

25. Pemerintah daerah menerapkan unified budget yang mengintegrasikan anggaran rutin dan pembangunan. Keuntungan utama pendekatan ini adalah:

A. Memisahkan secara jelas belanja operasional dan modal

B. Memberikan fleksibilitas alokasi untuk prioritas pembangunan holistik

C. Mengurangi transparansi anggaran

D. Mempersulit perencanaan jangka panjang

E. Meningkatkan birokrasi pelaporan

26. Pemerintah akan membangun jembatan dengan biaya Rp 100 miliar. Analisis menunjukkan NPV = Rp 20 miliar, BCR = 1,2, IRR = 12%, tetapi ada dampak lingkungan negatif dan relokasi 50 keluarga. Keputusan investasi seharusnya:

A. Langsung disetujui karena NPV positif

B. Ditolak karena BCR terlalu rendah

C. Mempertimbangkan aspek sosiallingkungan di samping finansial

D. Hanya fokus pada IRR yang tinggi

E. Diabaikan karena sektor publik tidak perlu analisis

27. Proyek pembangunan rumah sakit memiliki NPV = Rp 5 miliar jika hanya menghitung revenue, tetapi benefit sosial (nilai kesehatan masyarakat) diestimasi Rp 50 miliar. Pendekatan analisis yang tepat adalah:

A. Menolak proyek karena NPV negatif

B. *CostBenefit Analysis* dengan monetisasi social benefit

C. Hanya menggunakan *payback period*

D. Mengabaikan benefit sosial karena sulit diukur

E. Fokus hanya pada profit komersial

28. Dalam membandingkan dua proyek infrastruktur dengan umur ekonomis berbeda (Proyek A: 10 tahun, Proyek B: 20 tahun), metode yang paling tepat adalah:

A. Membandingkan NPV langsung tanpa penyesuaian

B. Menggunakan *Equivalent Annual Cost (EAC)* atau NPV dengan *common horizon*

C. Hanya melihat *payback period*

D. Memilih proyek dengan biaya awal terendah

E. Mengabaikan perbedaan umur ekonomis

29. Discount rate yang digunakan dalam analisis investasi sektor publik (*social discount rate*) umumnya lebih rendah dari sektor swasta karena:

A. Pemerintah tidak perlu return on investment

B. Mencerminkan *time preference* masyarakat dan *intergenerational equity*

C. Proyek pemerintah selalu lebih murah

D. Tidak ada risiko dalam investasi publik

E. Regulasi mengharuskan demikian tanpa alasan ekonomi

30. Sebuah proyek pengadaan armada bus kota memiliki Payback Period 3 tahun, tetapi benefit ekonomi (pengurangan kemacetan, polusi) baru signifikan setelah 5 tahun. Kelemahan menggunakan *Payback Period* sebagai kriteria utama adalah:

A. Terlalu kompleks untuk dihitung

B. Mengabaikan benefit jangka panjang dan *time value of money*

- C. Terlalu fokus pada aspek lingkungan
- D. Tidak memperhitungkan biaya awal
- E. Terlalu konservatif dalam analisis

31. Tarif PDAM ditetapkan Rp 3.000/m³ sementara biaya produksi Rp 4.500/m³. Kebijakan ini dapat dibenarkan jika:

- A. PDAM bertujuan memaksimalkan profit
- B. Ada subsidi pemerintah untuk menjamin akses air bagi masyarakat miskin**
- C. Semua pelanggan mampu membayar lebih tinggi
- D. Biaya produksi dapat diabaikan dalam sektor publik
- E. Kompetisi dengan penyedia swasta sangat ketat

32. Dalam menentukan tarif parkir, pemerintah kota mempertimbangkan: (1) biaya pengelolaan, (2) mengurangi kemacetan, (3) mendorong penggunaan transportasi umum. Pendekatan ini menggambarkan:

- A. *Pure market pricing*
- B. *Cost recovery dan regulatory/behavioral objectives***
- C. *Penetration pricing* untuk *market share*
- D. *Predatory pricing* untuk monopoli
- E. *Price discrimination* tingkat satu

33. Rumah sakit pemerintah menerapkan tarif berbeda untuk pasien umum (Rp 500.000) dan pasien BPJS (Rp 350.000) untuk layanan yang sama. Strategi ini disebut:

- A. *Dumping pricing*
- B. *Price discrimination* untuk *equity* dan akses pelayanan**
- C. *Loss leader pricing*
- D. *Skimming pricing*
- E. *Uniform pricing*

34. Jika elastisitas permintaan terhadap layanan pendidikan dasar sangat inelastis (kebutuhan pokok), maka strategi penetapan tarif yang paling sesuai dengan prinsip equity adalah:

- A. Tarif tinggi untuk maksimalkan pendapatan

B. Tarif rendah atau gratis dengan subsidi penuh untuk akses universal

C. Tarif berbasis kemampuan pasar

D. Tarif fluktuatif mengikuti penawaranpermintaan

E. Tarif premium untuk semua segmen

35. Pemerintah menetapkan tarif retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang tinggi. Kriteria yang PALING penting untuk memastikan tarif ini adil adalah:

A. Menghasilkan profit maksimal bagi kas daerah

B. Proporsional dengan biaya pelayanan dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan

C. Sama dengan tarif sektor swasta

D. Setinggi mungkin untuk mengurangi pembangunan

E. Gratis untuk semua kalangan tanpa pertimbangan biaya